

**AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA LANGSA DALAM
PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN
ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA LANGSA**

TESIS

Oleh

Jambo Pramana
NPM. 221801026



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/7/24

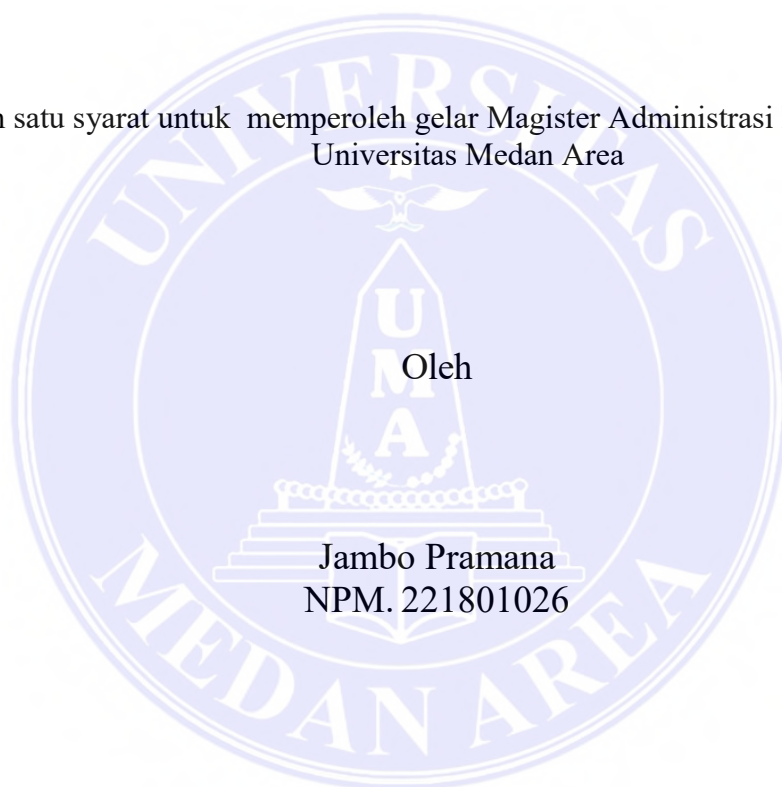
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/7/24

**AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA LANGSA DALAM
PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN
ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA LANGSA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Pascasarjana
Universitas Medan Area



Oleh
Jambo Pramana
NPM. 221801026

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/7/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI NEGARA

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Dan Belanja Daerah Kota Langsa

Nama : Jambo Pramana

NPM : 221801026

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Budi Hartono, M.Si

Pembimbing II



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Beby Mashito Batubara, S.Sos, M.AP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 30 Maret 2024

Nama : Jambo Pramana

NPM : 221801026



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

Sekretaris : Dr. Nadra Ideyani Vita, M.Si

Pembimbing I : Dr. Budi Hartono, M.Si

Pembimbing II : Isnaini, SH, M.Hum, PhD

Penguji Tamu : Dr. Adam, MAP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)9/7/24

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka



Medan, Maret 2024

Jambo Pramana

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jambo Pramana
NPM : 221801026
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Dan Belanja Daerah Kota Langsa

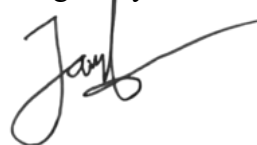
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



Jambo Pramana

ABSTRAK

AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA LANGSA DALAM PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH KOTA LANGSA

Nama : Jambo Pramana
NPM : 221801026
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Budi Hartono, M.Si
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi pada dasarnya adalah prestasi para anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah. Konsep kinerja pemerintah daerah sendiri muncul ketika institusi pemerintahan mulai mencoba mengenalkan konsep baru dalam pengelolaan urusan publik menjadi *good governance*. Permasalahan terkait kinerja penyusunan anggaran dan belanja daerah di Kota Langsa adalah mengenai penerapan anggaran kinerja dirasakan belum optimal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian berjumlah 6 orang. Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data Miles, Huberman dan Saldana. Hasil menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa dalam perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa sudah memenuhi standar pelayanan yang sesuai dengan teori kinerja Pollit & Bouckaert yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, peneliti menyarankan disediakannya petugas pendamping untuk Organisasi Perangkat Daerah yang terkendala dalam penyusunan anggaran.

Kata kunci : kinerja, akuntabilitas, perencanaan anggaran

ABSTRACT

ACCOUNTABILITY OF THE PERFORMANCE OF THE LANGSA CITY REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT BOARD IN PLANNING AND PREPARING THE LANGSA CITY REGIONAL BUDGET AND EXPENDITURE

Name : Jambo Pramana
Student Number : 221801026
Major : Magister Ilmu Administrasi Publik
1st Advisor : Dr. Budi Hartono, M.Si
2nd Advisor : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

The performance achieved by an organization is basically the achievement of the members of the organization itself, from the top level to the bottom level. The concept of regional government performance itself emerged when government institutions began to try to introduce new concepts in managing public affairs to become good governance. The problem related to the performance of regional budget preparation and expenditure in Langsa City is that the implementation of the performance budget is felt to be not optimal. This research was conducted using qualitative research methods. The procedures used in data collection are observation, interviews and documentation. There were 6 informants in the research. The data analysis technique used in this research is the Miles, Huberman and Saldana data analysis model. The results show that the performance accountability of the Langsa City Regional Financial Management Agency in planning the preparation of the Langsa City Regional Revenue and Expenditure Budget has met service standards in accordance with Pollit & Bouckaert's performance theory used in this research. To perfect and improve the planning performance of the Langsa City Revenue and Expenditure Budget at the Langsa City Regional Financial Management Agency, researchers suggest providing assistant officers for Regional Apparatus Organizations that are having problems in budget preparation.

Key words: *performance, accountability, budget planning*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan seluruh rahmat dan karunia serta ridho-Nya, yang telah memberi kesehatan dan kesempatan kepada saya untuk dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Dan Belanja Daerah Kota Langsa”. Sholawat dan salam saya sanjungkan kepada Nabi Muhammad Rusulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan umat dari zaman jahiliyah ke zaman peradapan yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan dan nikmati sampai saat ini.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini dan secara khusus pada kesempatan ini peneliti menyampaikan salam hormat saya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

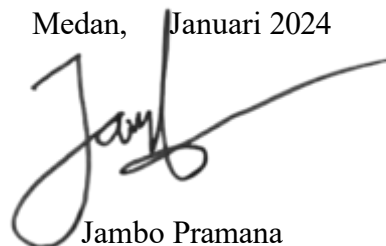
1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc, selaku Rektor Unirversitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP, Selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area
4. Bapak Dr. Budi Hartono, M. Si, Selaku Pembimbing I yang telah dengan

sangat sabar membimbing saya.

5. Bapak Dr. Isnaini, SH, M. Hum Selaku Pembimbing II yang telah dengan sangat sabar membimbing saya
6. Orang tua tercinta dan adik-adik, yang telah berjasa besar dalam perjalanan kehidupan penulis, untuk doa, semangat dan materi yang diberikan.
7. Istri dan anak-anak tercinta atas doa, semangat dan dorongan serta pengorbanan yang tulus dalam mendampingi penulis menyelesaikan studi dan tesis ini.
8. Rekan – rekan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa terkhusus Bidang Anggaran atas doa dan semangat yang diberikan.
9. Para Pengajar dan staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area, serta seluruh teman Magister Administrasi Publik yang selalu memberi dukungan dan semangat, semoga segala bantuan yang diberikan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah, Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan akan peneliti terima dengan senang hati. Semoga tesis ini dapat menjadi kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan.

Medan, Januari 2024



Jambo Pramana

HALAMAN MOTTO

"Dalam setiap kegagalan, kekuatan mental kita yang tengah diuji. Sebaliknya,
dalam kesuksesan, kerendahan hati kitalah yang tengah diuji."



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN MOTTO	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Konsep Kinerja Birokrasi.....	7
2.1.1 Teori Akuntabilitas.....	7
2.1.2 Bentuk Akuntabilitas.....	10
2.1.3 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	12
2.1.4 Tiga Dimensi Akuntabilitas	14
2.2 Konsep Kinerja	16
2.3 Konsep Birokrasi.....	20
2.3.1 Konsep Kinerja Birokrasi.....	25
2.4 Pemerintah Daerah	33
2.5 Anggaran	37
2.6 Perencanaan Anggaran.....	44
2.7 Kerangka Berpikir Penelitian.....	47
2.8 Hasil Penelitian Terdahulu.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	50
3.2 Bentuk Penelitian	50
3.3 Informan Penelitian	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5 Definisi Konsep dan Defini Operasional	53
3.5.1 Definisi Konsep.....	53
3.5.2 Definisi Operasional.....	54
3.6 Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
4.1.1 Kota Langsa	57
4.1.2 Keadaan Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.. (BPKD) Kota Langsa.....	60
4.2 Deskripsi Data Penelitian.....	62
4.3 Analisis Data	63
4.3.1 Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusun	

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.....	64
4.3.2 Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.....	71
4.4 Pembahasan	79
BAB V PENUTUP.....	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir Penelitian	47
Gambar 3.1	Analisis Data Model Miles, Huberman & Saldana (2014)..	56



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu	48
Tabel 4.1	Data Informan Penelitian.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi pada dasarnya adalah prestasi para anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah. Konsep kinerja pemerintah daerah sendiri muncul ketika institusi pemerintahan mulai mencoba mengenalkan konsep baru dalam pengelolaan urusan publik menjadi *good governance*. Organisasi yang berhasil merupakan organisasi yang memiliki visi dan misi yang jelas serta terukur. Artinya bahwa visi dan misi tidak akan bermakna ketika tidak teraktualisasikan dalam kinerja organisasi dalam kerangka menciptakan *good governance*. Dalam upaya mencapai suatu kinerja organisasi dengan baik, maka diperlukannya suatu rencana kerja yang baik, terarah, dan komprehensif, sehingga mudah bagi manajemen untuk mengendalikan kegiatan operasional dari organisasi tersebut. Adapun yang dihasilkan tersebut disajikan dalam anggaran yang disusun oleh manajemen berdasarkan target yang disesuaikan dengan kondisi maupun kebutuhan organisasi, yang periodenya bersifat satu tahun, maupun periode yang bersifat lebih dari satu tahun, dan disusun dengan format tertentu (Salbiah dan Rizky, 2012).

Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik namun sebenarnya agak terlalu luas untuk didefinisikan, akan tetapi hal ini sering digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah

pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan (Dwi Setiawan, 2001).

Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijaksanaan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Karena itu dilihat dari dimensi ini, kinerja organisasi oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai - nilai dan norma - norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat (Bachtiar Arif, 2008).

Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa mengagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Sering dijumpai dalam praktek, penyusunan atau perencanaan anggaran seolah-olah merupakan bagian yang terpisah dengan pelaksanaan anggaran sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan tujuan organisasi. Penganggaran seperti ini tidak bisa menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi.

Terkait proses pengelolaan anggaran oleh aparat pemerintah yang terbilang belum optimal sehingga berakibat pada rendahnya kinerja organisasi, yang seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah daerah dimana pemerintah daerah sebagai penerima wewenang dalam mengelola organisasi perlu

melakukan pekerjaan dengan sebaik baiknya untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal ini pencapaian kinerja organisasi yang baik. Agar tidak terjadi permasalahan - permasalahan dalam menjalankan kewajibannya khususnya yang terkait dengan permasalahan anggaran.

Permasalahan penganggaran yang selama ini terjadi di setiap daerah, dalam proses penyusunan, pembahasan sampai pada penetapan anggaran yang termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan kumpulan RKA OPD, umumnya perhatian DPRD lebih terfokus pada besarnya anggaran (Subiyantoro, 2011). Penentuan anggaran secara incremental, penentuan anggaran dipengaruhi oleh nama kegiatan, penentuan anggaran dipengaruhi oleh siapa yang mengajukan anggaran. Fenomena ini merupakan bentuk dari lemahnya perencanaan anggaran pada pemerintah daerah. Evaluasi anggaran juga memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan. Transparansi dalam penyusunan APBD di Kota Langsa mempengaruhi dari akuntabilitas kinerja BPKD, agar terwujudnya *good governance* dalam penyusunan APBD Kota Langsa, selain itu salah satu sasaran strategis BKPD Kota Langsa menurut LKIP BPKD Kota Langsa adalah meningkatnya efektifitas proses penyusunan penganggaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan dengan indikator kinerja utama penetapan APBD tepat waktu, tentunya dapat menjadi fokus bagaimana kinerja BPKD dalam memujudkan sasaran strategis tersebut.

Evaluasi merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang digunakan untuk menilai dan mengukur pelaksanaan kegiatan, kinerja, penilaian kemampuan SDM, penilaian catatan hasil, penilaian laporan keuangan dan pemeriksaan hasil

untuk mencapai rencana yang telah ditetapkan. Tetapi yang paling penting dari evaluasi adalah adanya upaya untuk menelusuri setiap penyebab yang menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan anggaran, yang berakibat pada rendahnya kinerja organisasi. Dengan adanya evaluasi kinerja, maka diharapkan dapat ditemukan hal-hal apa saja yang tidak mendukung pelaksanaan anggaran, kemudian sedapat mungkin menemukan cara penyelesaian terhadap berbagai kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaan anggaran dapat dilanjutkan dengan arah yang sesuai dengan rencana, yang berarti akan meningkatkan kinerja anggaran.

Permasalahan terkait penyusunan anggaran dan belanja daerah di Kota Langsa adalah mengenai penerapan anggaran kinerja dirasakan belum optimal. Fenomena diatas terjadi akibat penyusunan anggaran yang masih belum mematuhi kaidah-kaidah yang telah diterapkan. Pada beberapa sisi, khususnya program dan kegiatan yang dianggarkan oleh OPD, masih sangat dipengaruhi oleh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula dengan penentuan besarnya anggaran belum sepenuhnya mengacu pada target berupa *output* dan *outcome*.

Keinginan untuk penerapan good governance di Kota Langsa, kedua adalah kebutuhan akuntabilitas penganggaran daerah. Dengan sistem penganggaran berbasis kinerja, evaluasi terhadap pencapaian kinerja akan lebih mudah diketahui. Hal ini dimungkinkan karena adanya indikator-indikator yang jelas untuk mengukur tidak hanya keluaran namun juga hasil. Bahkan bisa juga di ukur manfaat (benefit) dari suatu kebijakan penganggaran yang diterapkan. Ketiga adalah kebijakan anggaran sebelumnya yang menaungkan rencana anggaran dalam suatu dokumen perencanaan lima tahunan yang ditetapkan dengan undang-

undang dirasakan tidak realistis dan tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dalam era globalisasi. Kondisi penyusunan anggaran yang dilakukan di Kota Langsa saat ini masih belum sesuai daam pemanfaatan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah, yaitu masih belum optimalnya penggunaan aplikasi keuangan SIPD yang terbaru karena masih kurangnya sumber daya aparatur yang memahami dalam penggunaan aplikasi tersebut.

Sesuai dengan latar belakang diatas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Langsa. Untuk mengetahui lebih detail dapat di peroleh dari hasil penelitian, oleh karena itu maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa dalam Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyusunan anggaran dalam hal pemanfaatan dan penggunaan aplikasi SIPD dalam perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Langsa.
2. Bagaimanakah kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa dalam Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa bagaimanakah akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa dalam perencanaan dan penyusunan APBK Kota Langsa
2. Untuk menganalisa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perencanaan dan penyusunan APBK Kota Langsa di BPKD Kota Langsa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengembangan ilmu bidang Administrasi Publik tentang akuntabilitas kinerja perencanaan dan penyusunan APBK di BPKD Kota Langsa.

2. Manfaat Praktisi

Memberikan sumbangsih pemikiran tentang akuntabilitas kinerja perencanaan dan penyusunan APBK di BPKD Kota Langsa

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Konsep Kinerja Birokrasi

1.1.1 Teori Akuntabilitas

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Terdapat berbagai definisi tentang akuntabilitas, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Sjahrudin Rasul (2000) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, “seseorang” tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.

2. J.B. Ghartey (1998) menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan.
3. Ledvina V. Carino (2002) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik yang masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab dan kewenangannya. Setiap orang harus benar-benar menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya akan memberi pengaruh pada dirinya sendiri saja. Akan tetapi, ia harus menyadari bahwa tindakannya juga akan membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah harus memperhatikan lingkungannya.
4. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

5. Akuntabilitas juga dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Dalam konteks ini, pengertian akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolak ukur pengukuran kinerja.

Polidano (1998) menawarkan kategorisasi baru yang disebutnya sebagai akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggung jawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggung jawaban vertikal melalui rantai komando tertentu. Polidano lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas, yaitu:

1. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat.
2. birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing).
3. Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung

berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru (newpublic management). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru.

4. Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsmen, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti media massa dan kelompok penekan. Aspek subyektivitas dan ketidakterprediksikan dalam proses peninjauan ulang itu seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya.

Dari berbagai definisi akuntabilitas seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

1.1.2 Bentuk Akuntabilitas

Dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhannya. Akuntabilitas yang demikian ini meliputi pertanggungjawaban diri sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankannya yang hanya diketahui dan dipahami oleh dia sendiri. Oleh karena itu, akuntabilitas internal ini disebut juga sebagai akuntabilitas spiritual.

Akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat. Kegagalan seseorang untuk memenuhi akuntabilitas eksternal mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepadanya. Akuntabilitas eksternal lebih mudah diukur mengingat norma dan standar yang tersedia memang sudah jelas. Kontrol dan penilaian dari pihak eksternal sudah ada dalam mekanisme yang terbentuk dalam suatu sistem dan prosedur kerja.

Akuntabilitas eksternal baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi merupakan hal yang paling banyak dibicarakan dalam konteks akuntabilitas. Akuntabilitas eksternal terdiri dari :

1. Akuntabilitas Eksternal untuk Pelayanan Publik pada Organisasi Sendiri.

Dalam akuntabilitas ini, setiap tingkatan pada hierarki organisasi diwajibkan untuk *accountable* kepada atasannya dan kepada yang mengontrol pekerjaannya. Untuk itu, diperlukan komitmen dari seluruh petugas untuk memenuhi kriteria pengetahuan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan posisi tersebut.

2. Akuntabilitas Eksternal untuk Individu dan Organisasi Pelayanan Publik di luar Organisasi Sendiri.

Akuntabilitas ini mengandung pengertian akan kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan wewenang. Untuk itu, selain kebutuhan akan pengetahuan dan keahlian seperti yang disebutkan sebelumnya, juga dibutuhkan komitmen

untuk melaksanakan kebijakan dan program-program yang telah dijanjikan/dipersyaratkan sebelum dia memegang jabatan tersebut.

1.1.3 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaannya harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Penetapan perencanaan stratejik.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja.
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimulai dari penyusunan perencanaan stratejik (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan stratejik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun. Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (output/outcome) dari seluruh sasaran stratejik dalam tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya.

Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan metode

pengumpulan data kinerja. Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

1.1.4 Tiga Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas Politik, biasanya dihubungkan dengan proses dan mandat pemilu, yaitu mandat yang diberikan masyarakat kepada para politisi yang menduduki posisi legislatif dalam suatu pemerintahan. Masa jabatan kekuasaan tersebut bersifat temporer karena mandat pemilu sangat tergantung pada hasil pemilu yang dilakukan pada interval waktu tertentu. Untuk negara-negara di mana mandat pemilu mendapat legitimasi penuh (pemilu bersifat bebas dan hasilnya diterima oleh semua pihak), masyarakat menggunakan hak suaranya untuk mempertahankan para politisi yang mampu menunjukkan kinerja yang baik serta menjatuhkan pemerintahan yang berunjuk prestasi buruk. Mandat elektoral yang kuat memberikan legitimasi kepada pemerintah dan membantu menjamin kredibilitasnya, di samping stabilitas dan prediktibilitas kebijakan yang diformulasikannya.

Akuntabilitas Finansial, fokus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, yang biasanya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit secara profesional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Masalah pokoknya adalah ketepatan waktu

dalam menyiapkan laporan, proses audit, serta kualitas audit. Perhatian khusus diberikan pada kinerja dan nilai uang serta penegakan sanksi untuk mengantisipasi dan mengatasi penyalahgunaan, missmanajemen, atau korupsi. Jika terdapat bantuan finansial eksternal, misalnya dari pinjaman lembaga keuangan multilateral atau melalui bantuan pembangunan oleh lembaga donor, maka standar akuntansi dan audit dari berbagai lembaga yang berwenang harus diperhatikan. Hal inilah yang kiranya dapat menjelaskan besarnya perhatian pada standar akuntansi dan audit internasional dalam menegakkan akuntabilitas finansial. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi tingkat efisiensi penggunaan dana. Hasil tersebut juga dapat digunakan oleh masyarakat umum dan stakeholders (seperti donor) untuk menilai kinerja pemerintah berdasarkan sasaran tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Akuntabilitas administratif, merujuk pada kewajiban untuk menjalankan tugas yang telah diberikan dan diterima dalam kerangka kerja otoritas dan sumber daya yang tersedia. Dalam konsepsi yang demikian, akuntabilitas administratif umumnya berkaitan dengan pelayan publik, khususnya para direktur, kepala departemen, dinas, atau instansi, serta para manajer perusahaan milik negara. Mereka adalah pejabat publik yang tidak dipilih melalui pemilu tetapi ditunjuk berdasarkan kompetensi teknis. Kepada mereka dipercayakan sejumlah sumber daya yang diharapkan dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu.

2.2. Konsep Kinerja

Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Veithzal, 2005:97). Kinerja karyawan tidak hanya sekedar informasi untuk dapat dilakukannya promosi atau penetapan gaji bagi perusahaan. Akan tetapi bagaimana perusahaan dapat memotivasi karyawan dan mengembangkan satu rencana untuk memperbaiki kemerosotan kinerja dapat dihindari.

Kinerja karyawan perlu adanya penilaian dengan maksud untuk memberikan satu peluang yang baik kepada karyawan atas rencana karier mereka dilihat dari kekuatan dan kelemahan, sehingga perusahaan dapat menetapkan pemberian gaji, memberikan promosi, dan dapat melihat perilaku karyawan. Penilaian kinerja dikenal dengan istilah “performance rating” atau “performance appraisal”. Menurut munandar (2008:287), penilaian kinerja adalah proses penilaian ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja, dan hasil kerja seseorang tenaga kerja atau karyawan (pekerja dan manajer), yang dianggap menunjang unjuk kerjanya, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan tentang tindakan-tindakan terhadap bidang ketenagakerjaan. Suatu perusahaan melakukan penilaian kinerja didasarkan pertimbangan bahwa perlu adanya suatu sistem evaluasi yang objektif terhadap organisasional. Selain itu, dengan adanya penilaian kinerja, manajer puncak dapat memperoleh dasar yang objektif untuk memberikan kompensasi sesuai dengan prestasi yang disumbangkan masing-masing pusat pertanggungjawaban kepada perusahaan

secara keseluruhan. Semua ini diharapkan dapat membentuk motivasi dan rangsangan kepada masing-masing bagian untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

Menurut Sutrisno (2010:46), kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas.

Menurut Sudarmanto (2009:25), kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi /dihasilkan atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu dan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Sedangkan menurut Wilson Bangun (2012:230) menjelaskan bahwa peningkatan kinerja merupakan hal yang diinginkan baik dari pihak pemberi kerja maupun para pekerja.

Pemberi kerja menginginkan kinerja karyawannya baik untuk kepentingan peningkatan hasil kerja dan keuntungan perusahaan. Disisi lain, para pekerja berkepentingan untuk pengembangan diri dan promosi pekerjaan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kinerja karyawan yang baik bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, perbaikan sistem kerja dilakukan oleh setiap komponen yang ada dalam perusahaan. Untuk tujuan tersebut akan dibutuhkan system manajemen kinerja yang baik.

Menurut Rue dan Byars (1980:376), Kinerja diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau “The degree of accomplishment” atau dengan kata lain kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Definisi tersebut

mengandung pengertian bahwa melalui kinerja, tingkat pencapaian organisasi dapat diketahui. Pencapaian atas tujuan-tujuan organisasi tersebut dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai baik atau buruknya kinerja organisasi.

Konsep kinerja menurut Osborne dalam Quade (1990:1) berpendapat bahwa kinerja sebagai tingkat pencapaian misi organisasi merupakan Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi (visi). Semakin banyak misi yang dilakukan, maka semakin bagus kinerja dari organisasi yang bersangkutan. Begitu juga sebaliknya, kinerja organisasi dikatakan buruk apabila hanya sedikit misi yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

Konsep kinerja berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dalam pelaksanaannya ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planning) suatu organisasi. Maksud definisi tersebut adalah dengan kinerja terdapat gambaran tingkat pencapaian dari pelaksanaan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah dirumuskan dalam strategic planning. Dengan kata lain, kinerja dapat dilihat dari tingkat pencapaian pelaksanaan program-program dari visi, misi, dan tujuan organisasi.

Kesimpulan konsep kinerja berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan pengukuran tingkat pencapaian atas tujuan organisasi sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan,

motivasi, dan keinginan pegawai. Dalam penelitian ini kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh pegawai yang dalam pelaksanaan tugas pekerjaan berdasarkan pada ukuran dan waktu yang telah ditentukan guna mewujudkan tujuan organisasi.

Kinerja adalah hasil yang diperoleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented atau nonprofit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu. Menurut Amstrong dan Baron (1998:15) kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.

Menurut Withmore dalam Sinambela (1997:107) mengemukakan bahwa kinerja merupakan ekspresi potensi seseorang dalam memenuhi tanggung jawabnya dengan menetapkan standar tertentu. Untuk meningkatkan kinerja yang optimum perlu ditetapkan standar yang jelas, yang dapat menjadi acuan bagi seluruh pegawai. Kinerja pegawai akan tercipta jika pegawai dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.

Sedangkan Harmani Pasolong dalam Fahmi (2011:5) mengatakan bahwa kinerja mempunyai beberapa elemen, yaitu :

1. Hasil kerja individual atau secara intitusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau kelompok.
2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk ditindaklanjuti, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik.
3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan

tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

4. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai moral dan etika yang berlaku umum.

Sedangkan kinerja menurut Amstrong dalam Dharma (2011:324-326) mengungkapkan bahwa kriteria kinerja diekspresikan sebagai aspek-aspek kinerja yang mencakup baik atribut (cara) maupun kompetensi. Ini adalah pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan hasil dan keahlian-keahlian tertentu yang dapat ditunjukkan oleh staf (kompetensi).

2.1.2 Konsep Birokrasi

Birokrasi berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah suatu sistem dalam organisasi yang dibuat dan dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, dengan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar. Pengertian Birokrasi juga dapat dilihat dengan jenis atau karakteristik dari Birokrasi itu sendiri, namun para pakar ilmu sosial masing-masing memiliki definisi yang berbeda-beda. Birokrasi menurut Max Weber dapat dikatakan sebagai suatu organisasi yang besar dengan mempunyai ciri-ciri otoritas legal rasional, legitimasi, ada pembagian kerja dan bersifat imperasional. Konsep dasar birokrasi tidak bisa dilepaskan dari konsep yang telah digagas oleh Max Weber sosiolog ternama asal Jerman yakni dalam karyanya "The Theory of Economy and Social Organization" yang telah dikenal

melalui ideal-type (tipe ideal) birokrasi modern. Model ini yang sering diadopsi dalam berbagai rujukan Birokrasi berbagai negara, termasuk di Indonesia. Konsepsi Birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber tersebut dapat dilihat dari legitimasi kekuasaan yang ada, yang kemudian dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu :

Rational-legal authority (Otoritas Legal Rasional) yaitu otoritas dimana legitimasi yang didasarkan pada keyakinan akan alat hukum yang diciptakan secara rasional dan juga pada kewenangan seseorang yang melaksanakan tata hukum sesuai prosedur. Max Weber yakin bahwa otoritas ini dapat diandalkan karena ini merupakan bentuk otoritas yang paling memuaskan dari segi teknis.

Traditonal authotiy (Otoritas Tradisional) yaitu otoritas dimana sebuah legitimasi yang bertumpu pada kepercayaan dan rasa hormat pada tradisi dan masing-masing pengemban tradisi. Menurut Max Weber otoritas ini merupakan sarana ketidaksetaraan yang diciptakan dan dipelihara karena jika tidak ada yang menentang otoritas ini maka pemimpin atau kelompok pemimpin akan tetap dominan.

Charismatic type (Otoritas Kharismatik) yaitu otoritas dimana legitimasi dilandaskan kepada kharisma yang dimiliki oleh seorang pemimpin sehingga ia dihormati dan dikagumi oleh pengikutnya.

Dalam kehidupan sehari-hari istilah Birokrasi setidak-tidaknya dimaknai sebagai berikut (Albrow dalam Zauhar, 1996):

1. Bureaucracy as Rational Organization

Birokasi sebagai Organisasi Rasional. Dalam pengertian ini birokrasi dimaknai sebagai suatu organisasi yang rasional dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Setiap tindakan birokrasi hendaknya mengacu pada pertimbangan-pertimbangan rasional.

2. Bureaucracy as Rule by Official

Birokrasi sebagai Aturan yang dijalankan oleh para pejabat. Birokrasi merupakan seperangkat aturan yang dijalankan oleh para pejabat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aturan-aturan itu dibuat guna mempermudah proses pelayanan publik. Namun pada kenyataannya aturan tersebut sering disalahgunakan demi kepentingan pejabat yang bersangkutan. Akibatnya masyarakat menjadi antipati dengan berbagai aturan yang dibuat oleh pejabat publik dan cenderung tidak ditaati.

3. Bureaucracy as Organizational Ineficiency Birokrasi sebagai Pemborosan yang dilakukan oleh organisasi. Pemborosan (ineficiency) yang dimaksudkan adalah pemborosan dalam segi waktu, tenaga, finansial maupun sumber daya lainnya. Seringkali niat baik birokrasi untuk memberikan layanan yang efisien justru berbalik menjadi layanan yang tidak efisien dan mengecewakan masyarakat. Karena itu masyarakat menjadi apatis terhadap berbagai slogan efisiensi yang disampaikan oleh aparat birokrasi. Semangat debirokratisasi menjadi tidak bermakna karena tidak diimbangi dengan sikap dan perilaku para pejabat yang tidak konsisten dan konsekuen dengan pernyataannya. Birokrasi justru dianggap sebagai tempat bersarangnya berbagai penyakit organisasi modern seperti pembengkakan pegawai, biaya tinggi dan sulit beradaptasi dengan

lingkungannya.

4. Bureaucracy as Public Administration Birokrasi sebagai Administrasi Publik. Birokrasi dalam hal ini disama artikan dengan administrasi publik. Administrasi Publik adalah proses pengelolaan sumber daya publik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Birokrasi adalah unsur pelaksana dari administrasi publik agar tujuan pelayanan kepada masyarakat tercapai secara efektif, efisien dan rasional.
5. Bureaucracy as Administration by Officials Birokrasi sebagai Administrasi yang dilaksanakan oleh para pegawai. Dalam hal ini pemahaman terhadap makna birokrasi hampir sama dengan bureaucracy as rule by official dan bureaucracy as public administration.
6. Bureaucracy as the Organization Birokrasi sebagai Organisasi. Organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi memiliki struktur dan aturan-aturan yang jelas dan formal. Organisasi merupakan suatu sistem kerjasama yang melibatkan banyak orang, dimana setiap orang mempunyai peran dan fungsi serta tugas yang saling mendukung demi tercapainya tujuan organisasi. Organisasi sebagai sistem kerjasama berarti:
 - a. Sistem mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dirumuskan secara baik, dimana masing-masing mengandung wewenang, tugas dan tanggung jawab yang memungkinkan setiap orang dapat bekerjasama secara efektif.
 - b. Sistem penugasan pekerjaan kepada orang-orang berdasarkan kekhususan bidang kerja masing-masing;
 - c. Sistem yang terencana dari suatu bentuk kerjasama yang memberikan peran tertentu untuk dilaksanakan kepada anggotanya.

7. Bureaucracy as Modern Society Birokrasi merupakan ciri dari masyarakat modern. Bagi masyarakat modern keberaturan merupakan sebuah kemestian. Keberaturan itu dapat dicapai jika dilaksanakan oleh suatu institusi formal yang dapat mengendalikan perilaku menyimpang masyarakat. Institusi formal itu adalah birokrasi.

Secara etimologi Birokrasi berasal dari istilah „buralist“ yang dikembangkan oleh Reiheer von Stein pada 1821, kemudian menjadi „bureaucracy“ yang akhir-akhir ini ditandai dengan cara-cara kerja yang rasional, impersonal dan legistik (Thoha, 1995 dalam Hariyoso, 2002).

Birokrasi menurut Evers dalam Zauhar (1996) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu:

1. Birokrasi dipandang sebagai rasionalisme prosedur pemerintahan dan aparat administrasi publik. Makna ini adalah sejalan dengan ide Weber tentang birokrasi, dan oleh Evers dinamakan Birokrasi Weber (BW).
2. Birokrasi dipandang sebagai bentuk organisasi yang membengkak dan jumlah pegawai yang besar. Konsep inilah yang sering disebut Parkinson Law.
3. Birokrasi dipandang sebagai perluasan kekuasaan pemerintah dengan maksud mengontrol kegiatan masyarakat. Oleh Evers (dalam Zauhar) disebut Orwelisasi.

Dengan demikian maka Istilah Birokrasi dalam masyarakat dimaknai secara diametral (bertentangan satu sama lain yang tidak mungkin mencapai titik temu):

1. Secara Positif: Birokrasi sebagai alat yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya alat yang efisien dan efektif ini maka tujuan

suatu organisasi (privat maupun publik) lebih mudah tercapai.

2. Secara Negatif: Birokrasi sebagai alat untuk memperoleh, mempertahankan dan melaksanakan kekuasaan. Birokrasi adalah sesuatu yang penuh dengan kekakuan (inflexibility) dan kemandegan struktural (structural static), tatacara yang berlebihan (ritualism) dan penyimpangan sasaran (pervesion goals), sifat pengabaian (alienation) serta otomatis (automatism) dan menutup diri terhadap perbedaan pendapat (constrain of dissent). Birokrasi seperti ini menurut Marx bersifat parasitik dan eksploitatif.

Dengan demikian maka Birokrasi dapat juga dimaknai sebagai suatu sistem kerja yang berlaku dalam suatu organisasi (baik publik maupun swasta) yang mengatur secara ke dalam maupun keluar. Mengatur ke dalam berarti berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut hubungan atau interaksi antara manusia dalam organisasi juga antara manusia dengan sumber daya organisasi lainnya. Sedangkan mengatur keluar berarti berhubungan dengan interaksi antara organisasi dengan pihak lain baik dengan lembaga lain maupun dengan individu-individu.

2.1.3 Konsep Kinerja Birokrasi

Menurut pendapat Agus Dwiyanto (2012), budaya paternalisme masih sangat kuat dan sangat mempengaruhi rendahnya kinerja birokrasi publik, dan cenderung mendorong pejabat birokrasi menjadi lebih berorientasi pada kekuasaan daripada pelayanan, dengan menempatkan dirinya sebagai penguasa dan memperlakukan para pengguna jasa sebagai obyek pelayanan yang membutuhkan bantuannya. Selain hal tersebut, sistem pembagian kekuasaan yang cenderung memusat pada pimpinan juga penyebab rendahnya kinerja.

Penerapan struktur birokrasi yang hierarkis mendorong adanya pemusatan kekuasaan dan wewenang pada atasan berakibat pejabat birokrasi yang langsung berhubungan dengan para pengguna jasa sering tidak memiliki wewenang yang memadai untuk merespons dinamika yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan. Beberapa indikator untuk mengukur kinerja birokrasi publik:

1. Produktivitas.

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

2. Kualitas layanan.

Kualitas layanan yaitu hasil kerja suatu kegiatan yang dilakukan yang dinilai dari kuantitas dan kualitasnya, yang menimbulkan rasa puas bagi masyarakat, dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja birokrasi publik.

3. Responsivitas.

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi.

Kumortorno (1996) menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain, adalah berikut ini.

4. Responsibilitas.

Responsibilitas menjelaskan kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.

Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap.

Salim & Woodward (1992) melihat kinerja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan persamaan pelayanan. Aspek ekonomi dalam kinerja diartikan sebagai strategi untuk menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin dalam proses penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik. Efisiensi kinerja pelayanan publik juga dilihat untuk menunjuk suatu kondisi tercapainya perbandingan terbaik/proporsional antara input pelayanan dengan output pelayanan.

Demikian pula, aspek efektivitas kinerja pelayanan ialah untuk melihat tercapainya pemenuhan tujuan atau target pelayanan yang telah ditentukan.

Prinsip keadilan dalam pemberian pelayanan publik juga dilihat sebagai

ukuran untuk menilai seberapa jauh suatu bentuk pelayanan telah memperhatikan aspek-aspek keadilan dan membuat publik memiliki akses yang sama terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan. Zeithaini, Parasuraman, dan Berry (1990) mengemukakan bahwa kinerja pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui berbagai indikator yang sifatnya fisik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui aspek fisik pelayanan yang diberikan, seperti tersedianya gedung pelayanan yang representatif, fasilitas pelayanan berupa televisi, ruang tunggu yang nyaman, peralatan pendukung yang memiliki teknologi canggih, misalnya komputer, penampilan aparat yang menarik di mata pengguna jasa, seperti seragam dan aksesoris, serta berbagai fasilitas kantor pelayanan yang memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat.

Berbagai perspektif dalam melihat kinerja pelayanan publik di atas memperlihatkan bahwa indikator-indikator yang dipergunakan untuk menyusun kinerja pelayanan publik ternyata sangat bervariasi. Secara garis besar, berbagai parameter yang dipergunakan untuk melihat kinerja pelayanan publik dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan. Pendekatan pertama melihat kinerja pelayanan publik dan perspektif pemberi layanan, dan pendekatan kedua melihat kinerja pelayanan publik dan perspektif pengguna jasa.

Pembagian pendekatan atau perspektif dalam melihat kinerja pelayanan publik tersebut hendaknya tidak dilihat secara diametrik, melainkan tetap dipahami sebagai suatu sudut pandang yang saling berinteraksi di antara keduanya. Hal tersebut disebabkan dalam melihat persoalan kinerja pelayanan

publik, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya secara timbal balik, terutama pengaruh interaksi lingkungan yang dapat mempengaruhi cara pandang birokrasi terhadap publik, demikian pula sebaliknya.

Dalam konteks kinerja birokrasi pelayanan publik di Indonesia, pemerintah melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 81 tahun 1995 telah memberikan berbagai rambu-rambu pemberian pelayanan kepada birokrasi publik secara baik. Berbagai prinsip pelayanan, seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, dan keadilan yang merata merupakan prinsip-prinsip pelayanan yang harus diakomodasi dalam pemberian pelayanan publik di Indonesia.

Prinsip kesederhanaan, misalnya, mempunyai maksud bahwa prosedur atau tata cara pemberian pelayanan publik harus didesain sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat menjadi mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. Perkembangan lingkungan global juga telah memberikan andil yang besar kepada birokrasi untuk semakin meningkatkan daya saing dalam kerangka pasar bebas dan tuntutan globalisasi.

Birokrasi publik dituntut harus mampu memberikan pelayanan yang sebaik mungkin, baik kepada publik maupun kepada investor dari negara lain. Salah satu strategi untuk merespons perkembangan global tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas birokrasi dalam pemberian pelayanan, publik. Penerapan strategi yang mengintegrasikan pendekatan kultural dan struktural ke dalam sistem pelayanan birokrasi, yang disebut dengan Total Quality

Management (TQM), dapat dilakukan untuk semakin meningkatkan produktivitas dan perbaikan pelayanan birokrasi.

Perbaikan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik menjadi isu yang semakin penting untuk segera mendapatkan perhatian dan semua pihak.

Birokrasi yang memiliki kinerja buruk dalam memberikan pelayanan kepada publik akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan daya saing suatu negara pada era global.

Birokrasi pelayanan publik di Indonesia, berdasarkan laporan dan The World Competitiveness Yearbook tahun 1999 berada pada kelompok negara-negara yang memiliki indeks competitiveness paling rendah di antara 100 negara paling kompetitif di dunia (Cullen & Cushman, 2000: 15) semakin buruk dan semakin korup karena dengan semakin besarnya skor yang dimiliki, semakin buruk kualitas birokrasi di suatu negara.

Birokrasi di Indonesia dalam tahun 2001 hanya lebih baik dibandingkan dengan India dan Vietnam. Dan kacamata iklim bisnis secara keseluruhan, dengan memperhatikan faktor sistemik, sosio-politik, lingkungan, pasar, dan dinamika perekonomian, Indonesia bahkan berada pada posisi paling bawah dalam indeks bisnis. Hal tersebut berarti bahwa Indonesia menjadi negara yang paling tidak menarik untuk tujuan melakukan investasi.

Kinerja birokrasi sebenarnya dapat dilihat melalui berbagai dimensi, seperti dimensi akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, responsivitas, maupun tanggung jawab. Berbagai literatur yang membahas kinerja birokrasi pada dasarnya memiliki kesamaan substansial yakni untuk melihat seberapa jauh

tingkat pencapaian hasil yang telah dilakukan oleh birokrasi pelayanan. Kinerja itu merupakan suatu konsep yang disusun dan berbagai indikator yang sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penggunaannya.

Perspektif yang digunakan oleh birokrasi sebagai pemberi layanan merupakan perspektif yang sebenarnya berasal dan pendekatan birokrasi yang cenderung menempatkan diri sebagai regulator daripada sebagai pelayan. Kinerja birokrasi pada awalnya banyak dipahami oleh kalangan birokrasi hanya aspek tanggung jawab, yakni sejauh mana pelayanan yang diherikan telah sesuai dengan aturan formal yang diterapkan.

Pemberian pelayanan yang telah menunjuk kepada aturan formal dianggap telah memenuhi sendi-sendi pelayanan yang baik dan aparat pelayanan dianggap telah konsisten dalam menerapkan aturan hukum pelayanan. Sulit untuk menelusuri lebih jauh, apakah penerapan prinsip tersebut telah membawa implikasi kepada kultur birokrasi pelayanan di Indonesia yang tidak dapat melakukan inisiatif dan inovasi pelayanan.

5. Akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat atau ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada dimasyarakat atau yang dimiliki para stakeholder. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholders.

Nilai dan norma pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut di antaranya meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa.

Akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-indikator kinerja yang meliputi:

1. Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa.
2. Tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila terdapat masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
3. Dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi.

Aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik seringkali masih menerapkan standar nilai atau norma pelayanan secara sepihak, seperti pemberian pelayanan yang hanya berdasarkan pada juklak (petunjuk dan pelaksanaan) sehingga kecenderungan yang terjadi adalah lemahnya komitmen aparat birokrasi untuk akuntabel terhadap masyarakat yang dilayaninya.

Salah satu faktor penyebab yang menjadikan rendahnya tingkat akuntabilitas birokrasi adalah terlalu amanya proses indoktrinasi kultur birokrasi yang mengarahkan aparat birokrasi untuk selalu melihat ke atas. Selama ini aparat birokrasi telah terbiasa lebih mementingkan kepentingan pimpinan daripada kepentingan masyarakat pengguna jasa. Birokrasi tidak pernah merasa

bertanggung jawab kepada publik, melainkan bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasannya. Transparansi informasi birokrasi dalam pemberian pelayanan publik masih tetap menjadi isu yang penting bagi upaya ke arah perbaikan kinerja birokrasi pemerintah. Tindakan untuk melakukan reformasi birokrasi terutama diarahkan pada upaya untuk peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi (Lubis, 2001). Pola pelayanan yang akuntabel adalah pola pelayanan yang mengacu pada kepuasan publik sebagai pengguna jasa.

Persepsi di kalangan aparat birokrasi yang selalu menempatkan diri (superior) terhadap publik sehingga menimbulkan sifat arogansi aparat birokrasi masih sangat dominan terlihat. Hasil temuan lapangan bahwa ini dapat memperlihatkan masih kuatnya kecenderungan orientasi pemberian pelayanan yang belum bersandar pada kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa budaya minta petunjuk atasan masih cenderung dijadikan referensi atau lebih dipentingkan pada melakukan pelayanan yang memuaskan masyarakat pengguna

2.3 Pemerintah Daerah

Pemerintah atau Government dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Menurut W.S Sayre dalam Syaifiie (2010:11) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan

menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter dalam Syafie (2010:11), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.

Selanjutnya, daerah adalah lingkungan pemerintah daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh (Nugraha, 2010: 145).

Lain halnya dengan C.F Strong dalam Huda (2012:28) yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD (Retnami, 2008:8).

Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan.

Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah. Menurut Harson dalam Sarundajang (2013:77), pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai :

- a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (*tugas medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya;
- b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat.

Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk

menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial (Bariun, 2015:36).

2.4 Anggaran

Anggaran Negara merupakan rencana keuangan pemerintah dalam suatu waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun mendatang, yang satu pihak memuat jumlah pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai tugas-tugas negara di segala bidang, dan di lain pihak memuat jumlah penerimaan negara yang diperkirakan dapat menutup pengeluaran tersebut dalam periode yang sama.

Penganggaran memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait yaitu stabilitas fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Anggaran negara juga berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengawasan aktivitas pemerintahan.

Anggaran berasal dari kata *budget* (Inggris), sebelumnya dari kata *bougette* (Perancis) yang berarti sebuah tas kecil. Berdasarkan dari arti kata

asalnya, anggaran mencerminkan adanya unsur keterbatasan. Pada dasarnya anggaran perlu disusun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah, dalam hal ini dana. Karena terbatasnya dana, maka diperlukan alokasi sesuai dengan prioritas dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Menurut Wildavsky (1975), anggaran adalah : (a) catatan masa lalu, (b) rencana masa depan, (c) mekanisme pengalokasian sumber daya, (d) metode untuk pertumbuhan, (e) alat penyaluran pendapatan, (f) mekanisme untuk negosiasi, (g) harapan-aspirasi-strategi organisasi, (h) satu bentuk kekuatan kontrol, dan (i) alat atau jaringan komunikasi. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, anggaran negara/daerah meliputi :

1. rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja;
2. gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan;
3. alat pengendalian;
4. instrumen politik; dan
5. disusun dalam periode tertentu.

Penganggaran (budgeting) merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja negara yang cenderung tanpa batas. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 10 menerangkan tugas Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pejabat pengelola APBD antara lain sebagai berikut :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
2. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan;
4. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
5. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sedangkan kepala OPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
2. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
4. melaksanakan pemungutan pendapatan bukan pajak;
5. mengelola barang/kekayaan milik daerah pada satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
6. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Menurut Indra Bastian, fungsi anggaran meliputi:

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja;

2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang/pedoman bagi pemerintah dalam mengelola untuk satu periode di masa yang akan datang;
3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan;
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja;
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi;
6. Anggaran merupakan instrumen politik; dan
7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

Sementara itu, menurut UU 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Anggaran disusun dengan berbagai sistem-sistem yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang melandasi pendekatan tersebut. Adapun sistem-sistem dalam penyusunan anggaran yang sering digunakan adalah:

a. *Traditional Budgeting System*

Traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran. Dalam sistem ini, perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan

anggaran dan penyusunan pembukuannya. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas obyek-obyek pengeluaran, sedangkan distribusi anggaran didasarkan atas jatah tiap-tiap departemen/lembaga. Sistem pertanggungjawabannya hanya menggunakan kuitansi pengeluaran saja, tanpa diperiksa dan diteliti apakah dana telah digunakan secara efektif/efisien atau tidak.

Mula-mula pemerintah memberi jatah dana untuk tiap-tiap departemen/ lembaga dan departemen/lembaga tersebut menggunakan dan melaporkan penggunaan dana tersebut sampai habis. Jadi tolok ukur keberhasilan anggaran tersebut adalah pada hasil kerja, maksudnya jika anggaran tersebut seimbang (balance) maka anggaran tersebut dapat dikatakan berhasil, tetapi jika anggaran tersebut defisit atau surplus, berarti anggaran tersebut gagal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem anggaran tradisional lebih menekan pada segi pertanggungjawaban keuangan dari sudut akuntansinya saja tanpa diuji efisien tidaknya penggunaan dana tersebut. Anggaran diartikan semata-mata sebagai alat dan sebagai dasar legitimasi (pengabsahan) berapa besarnya pengeluaran negara dan berapa besarnya penerimaan yang dibutuhkan untuk menutup pengeluaran tersebut.

b. *Performance Budgeting System*

Performance budgeting system berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem penyusunan anggaran ini selain berdasarkan apa yang dibelanjakan, juga didasarkan kepada tujuan-tujuan atau rencana-rencana tertentu, dan untuk pelaksanaannya perlu didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya/dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien. Sehingga dalam sistem anggaran performance ini bukan semata-mata berorientasi

kepada berapa jumlah yang dikeluarkan, tetapi sudah dipikirkan terlebih dulu mengenai rencana kegiatan, apa yang akan dicapai, proyek apa yang akan dikerjakan, dan bagaimana pengalokasian biaya agar digunakan secara efektif dan efisien.

Dalam buku Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2005) bahwa penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Sistem ini mulai menitikberatkan pada segi penatalaksanaan (*management control*), sehingga dalam sistem ini efisiensi penggunaan dana dan hasil kerjanya diperiksa. Salah satu syarat utama untuk penerapan sistem ini adalah digunakannya sistem akuntansi biaya sebagai alat untuk menentukan biaya masing-masing program dan akuntansi biaya sebagai alat untuk mengukur tingkat efisiensi pengeluaran dana. Tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah *performance* atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran itu dengan menggunakan dana secara efisien.

Buku Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2008 menyatakan: tuntutan pentingnya pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis

kinerja, ternyata membawa konsekuensi yang harus disiapkan beberapa faktor keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu :

1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.
2. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus.
3. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang).
4. Penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) yang jelas.
5. Keinginan yang kuat untuk berhasil.

Menurut Wahono (2001), Kepemimpinan sebagai suatu proses dan perilaku untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Komitmen dari seluruh komponen organisasi pemerintah daerah adalah kesepakatan antara kepala satuan kerja perangkat daerah beserta seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasinya untuk keberhasilan melaksanakan visi, misi, tujuan, sasaran, sesuai dengan Renstra OPD. Dan Hasil penelitian Siegel dan Marconi dalam Sembiring (2009) menyatakan bahwa partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran mempunyai hubungan yang positif dengan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan penyempurnaan sistem administrasi merupakan penyiapan instrumen pengukuran anggaran berbasis kinerja secara terus menerus. Sumber daya yang cukup yaitu tersedianya upaya peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja berupa adanya upaya penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kualitas implementasi anggaran berbasis kinerja. Hasil penelitian Nugroho (2006), “Reward dan punishment merupakan dua bentuk metode dalam memotivasi seseorang untuk

melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasinya”, dalam hal implementasi anggaran berbasis kinerja ini perlu dijaga konsistensi perencanaan dengan penganggaran dan pemberian reward dan punishment yang jelas bagi organisasi perangkat daerah.

c. *Planning, Programming, Budgeting System* (PPBS)

Perhatian dalam sistem PPBS ini banyak ditekankan pada penyusunan rencana dan program. Rencana disusun sesuai dengan tujuan nasional yaitu untuk kesejahteraan rakyat karena pemerintah bertanggungjawab dalam produksi dan distribusi barang maupun jasa dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang lain. Pengukuran manfaat penggunaan dana, dilihat dari sudut pengaruhnya terhadap lingkungan secara keseluruhan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas tujuan-tujuan yang hendak dicapai di masa yang akan datang. Mengenai proses penyusunan PPBS ini, melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan yang hendak dicapai;
2. Mengkaji pengalaman-pengalaman di masa lalu;
3. Melihat prospek perkembangan yang akan datang;
4. Menyusun rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan.

2.5 Perencanaan Anggaran

Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh (Suandy, 2011:2).

Perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absah dan bernilai (Kaufman dalam Harjanto, 2008:92).

Menurut Kunarjo (2012:63) perencanaan dapat disusun berdasarkan beberapa kriteria antara lain berdasarkan jangka waktu yang terdiri dari 3 jenis, yaitu (1) jangka panjang, contoh pada sistem perencanaan di Indonesia adalah rencana pembangunan jangka panjang (RPJP); (2) jangka menengah, contoh pada sistem perencanaan di Indonesia adalah rencana pembangunan jangka menengah (RPJM); (3) jangka pendek, contoh pada sistem perencanaan di Indonesia adalah rencana kerja pemerintah (RKP). Selain itu perencanaan dapat juga disusun berdasarkan tingkat keluwesan perencanaan yang terdiri dari 2 jenis, yaitu (1) perencanaan preskriptif, yaitu perencanaan yang bersifat kaku dan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan sehingga sangat jarang dilakukan perubahan (revisi), (2) perencanaan indikatif, yaitu perencanaan yang sarannya merupakan indikasi dari apa yang diinginkan untuk dicapai sehingga lebih luwes sifatnya dan mentolerir terjadinya revisi.

Menurut UU No 25 tahun 2004 perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan dimulai dari RPJP nasional yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional, kemudian RPJM nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program presiden yang memuat strategi

pembangunan nasional, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif.

Pada tingkatan pemerintah daerah, RPJM ini selanjutnya disebut dengan rencana strategis kementerian/lembaga atau lebih dikenal dengan Renstra. Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tingkat Walikota serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). RKP dan Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja yang disusun dengan mengacu pada RKP dan pagu indikatif ini selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA (Rencana kerja dan anggaran). Dokumen RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja serta menggunakan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja.

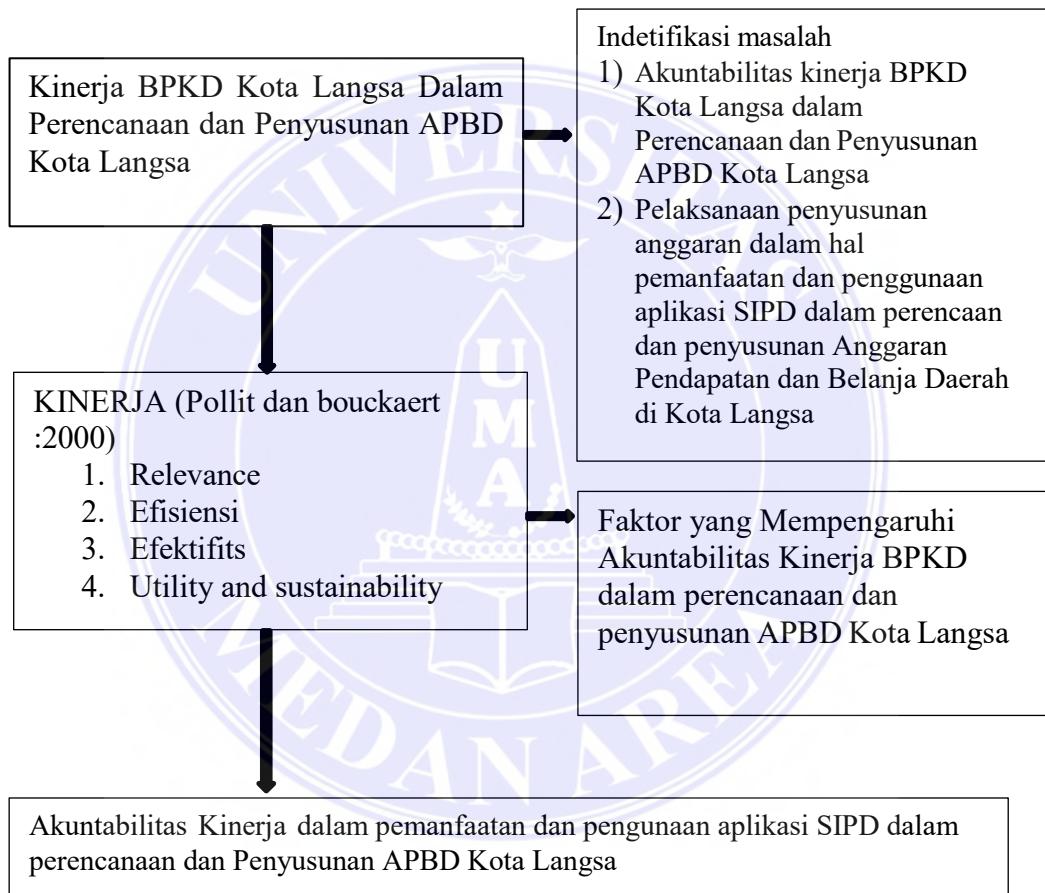
Selanjutnya RKA ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Jadi DPA adalah hasil transformasi dari dokumen perencanaan anggaran atau RKA yang dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah yang sangat berkaitan dengan perencanaan anggaran. Semakin baik perencanaan anggaran yang dibuat oleh OPD maka semakin baik pula kualitas DPA yang berujung pada semakin baiknya kualitas pelaksanaan anggaran ditandai dengan penyerapan anggaran yang efektif, efisien dan proporsional (Seftianova dan Adam, 2013).

2.6 Kerangka Berpikir Penelitian

Adapun bagan alur kerangka konseptual pada penelitian ini adalah :

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber : Pengelolaan Peneliti, 2023

2.7 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama , Judul Penelitian, Tahun Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Salbiah dan Ridha Rizky, Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2012	Kualitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel evaluasi anggaran menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variable kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Persamaan: Sama dengan penelitian menggunakan metode kualitatif Perbedaan: judul, fokus penelitian, lokasi dan hasil penelitian.
2.	Chelsea Pangalila, Evaluasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Keuangan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, 2017	Kualitatif	Proses penyusunan anggaran di Kecamatan Sonder di mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA/PPAS sampai dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) kemudian disajikan ke dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Penyusunan anggaran menggunakan pendekatan perencanaan, program dan anggaran terpadu. PPBS mensyaratkan organisasi menyusun rencana jangka panjang untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui program-program	Persamaan penelitian yaitu, meneliti proses perencanaan dan penyusunan anggaran APBD dan metode yang digunakan Perbedaan: judul, fokus penelitian, lokasi dan hasil penelitian.
3.	Faisal Ismid, Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, 2019.	Kualitatif	Hasil penelitian penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), KUA/PPAS sampai dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang penyusunannya berbasis kinerja. Penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan dan sanksi berpengaruh terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis Kinerja di Kabupaten Aceh Singkil	Persamaan : Penelitian sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sama-sama melihat kinerja organisasi Perbedaan : adalah Pendekatan teoritik yang digunakannya
4.	Billah, Kinerja Birokrasi pemerintah Dalam Pelayanan Publik” (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta).2008.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja birokrasi pemerintahan dalam pelayanan publik khususnya pada kantor pelayanan pajak Jakarta menunjukkan bahwa kinerja dipengaruhi oleh berbagai karakteristik lingkungan maupun pimpinan.	Persamaan: Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Aspek yang dikaji sama. Perbedaan: penelitian ini menggunakan pendekatan lebih komprehensif terhadap kinerja organisasi, serta faktor pendorong dan penghambat (karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja dan kebijakan & praktek pimpinan).

5	Teuku Rully Hendrawan, Analisis Perencanaan Dan Evaluasi Anggaran Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil, 2019.	Kualitatif	Hasil penelitian berupa faktor kendala dalam perencanaan adalah terdapat kecenderungan untuk mengurangi alokasi anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu dengan tujuan agar anggaran yang tersedia dapat dialokasikan ke berbagai program lainnya, dan kebutuhan uang persediaan untuk periode satu bulan tidak direncanakan dengan baik. Sedangkan faktor kendala dalam evaluasi kinerja, data atau informasi yang tersedia belum sepenuhnya dapat menunjukkan kondisi paling akhir, karena terdapat kemungkinan bahwa tahapan kegiatan yang dilaksanakan belum dilaporkan, atau terdapat kemungkinan bukti-bukti pengeluaran belum dibukukan karena masih dapat proses administrasi.	Persamaan : sama – sama membahas faktor pendukung dan faktor penghambat penyusunan anggaran APBD Perbedaan : judul, fokus penelitian, lokasi dan hasil penelitian.
6	Analisis Kinerja Birokrasi Publik Pada Dinas Sosial Kota Dumai, Afrizal, Dedy, 2018	Kualitatif	Hasil penelitian ini diperoleh skor 1.319 (68,69%) dengan kategori Baik. Faktor Pendukung ditemukan dalam penelitian ini yaitu, terdapatnya akuntabilitas pegawai dalam bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan terdapatnya responsibilitas dalam penyelenggaraan administrasi tugas-tugas pemerintahan bidang Sosial sedangkan faktor penghambat dalam penelitian yaitu masih kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan untuk penyandang sosial dan masih kurangnya produktivitas dalam upaya pencapaian program kerja yang telah dilaksanakan	Persamaan: Meneliti kinerja birokrasi publik Perbedaan: Menggunakan metode analisis statistik deskriptif Pengumpulan data dengan melalui angket
7	Kinerja Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, Marthan, 2017	Kualitatif	Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat terjadinya penurunan jumlah sekolah swasta, jumlah murid, dan jumlah guru. Terdapat angka partisipasi, angka kelulusan dan melanjutkan pendidikan. Kendala kinerja adalah tidak konsistennya perencanaan, penurunan anggaran secara drastis. Hambatan peningjatan kinerja adalah tenaga pendidikan, pendidik, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana serta hambatan alam	Persamaan: Penelitian sama menggunakan pendekatan kualitatif, sama-sama melihat kinerja organisasi Perbedaan: pendekatan teoritik yang digunakan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 02 Januari 2024 sampai 20 Januari 2024. Adapun Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berkedudukan di Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa.

3.2 Bentuk Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa. Tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesa atau membuat prediksi. Menurut Sugiyono (2014:27), metode deskriptif bertujuan untuk melukiskan secara sistematis kareteristik populasi atau bidang-bidang tertentu secara faktual dan cermat tanpa mencari atau menjelaskan suatu hubungan.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memiliki banyak informasi terkait dengan data penelitian dan dimintai informasi tentang subjek yang sedang dihadapi. Karena itu, istilah “informan” lebih erat dikaitkan dengan sumber yang biasanya ada dalam penelitian dan yang subjeknya biasanya dikelompokkan ke dalam “kasus”, seperti lembaga atau organisasi sosial. Moloeng (2014) mendefinisikan informan sebagai individu yang digunakan untuk memberikan informasi tentang

keadaan dan latar belakang penelitian. Hal senada diungkapkan oleh Sugiyono



(2017) yang mendefinisikan informan sebagai narasumber merujuk pada individu yang memahami subjek penelitian dan mampu memberikan penjelasan tentang subjek tersebut, adapun informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Informan kunci : Kepala BPKD Kota Langsa
Informan utama : Sekretaris BPKD Kota Langsa
Informan tambahan : Kabid Akutansi, Kabid Perbendaharaan, Kabid Aset dan inventarisasi, dan Kabid Pendapatan BPKD Kota Langsa, staf dan Stakeholder

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan data, menganalisis dan menyajikan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi. Yaitu observasi nonpartisipan, dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu: (1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Observasi juga bisa diartikan sebagai proses yang yang kompleks. Pengumpulan data dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa. Observasi dalam penelitian ini

dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah observasi terbuka. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan akuntabilitas kinerja perencanaan dan penyusunan APBD Kota Langsa Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang peneliti lakukan dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung. Wawancara ini ditunjukan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas kinerja perencanaan dan penyusunan APBD Kota Langsa Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa dan faktor pendukung dan penghambat tercapainya akuntabilitas kinerja perencanaan dan penyusunan APBD Kota Langsa Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa. Sedangkan pihak-pihak yang diwawancara adalah Kepala BPKD Kota Langsa, Sekretaris BPKD, Kabid Akutansi, Kabid Pebendaharaan, Kabid Aset dan inventarisasi, dan Kabid Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain lain. Dengan arti lain bahwa dokumentasi sebagai pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik. Digunakan Sebagai mendukung kelengkapan data yang lain. Instrumen penelitian ini adalah handphone, tape recorder, dan buku catatan. Dokumen yang akan menjadi bagian penelitian ini adalah dokumen jadwal pembagian tugas,

dokumen pembagian tugas tambahan dan dokumen dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja perencanaan dan penyusunan APBD Kota Langsa Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.

3.5 Definisi Konsep Dan Definisi Operasional

3.5.1. Definisi Konsep

Konsep dapat dimengerti sebagai suatu istilah untuk mendiskripsikan secara abstrak tentang suatu kejadian, kelompok, atau individu yang menjadi perhatian dalam ilmu sosial. Menurut pendapat Singarimbun dan Effendi (1989), penggunaan konsep diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (event) yang berkaitan satu sama lainnya. Definisi konsep dari variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Konsep akuntabilitas kinerja merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik atau pun tujuan yang akan di capai. Pentingnya manajemen kinerja setor publik adalah dalam rangka mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai akan kesuksesan organisasi sertor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relative murah dan berkualitas. Mahmudi (2005) menyatakan bahwa manajemen kinerja sektor publik mengandung prosedur, langkah-langkah dan tahapan yang membentuk suatu siklus kinerja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam suatu periode tertentu. Konsep

akuntabilitas kinerja adalah Memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada masyarakat mengenai APBD, termasuk proses perencanaan dan realisasi dan Membangun mekanisme akuntabilitas agar setiap tindakan pemerintah terkait APBD dapat dipertanggungjawabkan. Menyusun APBD dengan fleksibilitas untuk melakukan revisi jika terdapat perubahan keadaan atau kebijakan yang mendesak. Proses perencanaan dan penyusunan APBD yang baik dapat mendukung pembangunan daerah dan pemberian pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa, adalah unsur penunjang Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Badan Pengelolaan Keuangan d Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

3.5.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel penelitian dapat diuraikan dalam bentuk Indikator kinerja yang dikemukakan oleh Pollit dan Bouckaert (2000) sebagai berikut:

1. Relevance yaitu mengukur keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan;
2. Efisiensi, yaitu perbandingan antara *input* dengan *output*
3. Efektivitas yaitu tingkat kesesuaian antara tujuan dengan *intermediate outcomes (results)* dan *final outcomes (impacts)*.
4. *Utility and sustainability* yaitu mengukur kegunaan dan antara kebutuhan dengan *final outcomes (impacts)*.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini kegiatan analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh dari sumber data terkait dengan keterlambatan penyerapan anggaran.

Adapun 3 (tiga) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan Data Setelah arah penelitian dan sumber data diketahui, dilakukan pengumpulan data untuk mengumpulkan semua informasi dan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Masalah yang dipelajari harus tercermin dalam data yang dikumpulkan. Survei, kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah contoh strategi atau metode pengumpulan data yang mempermudah pengumpulan data.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

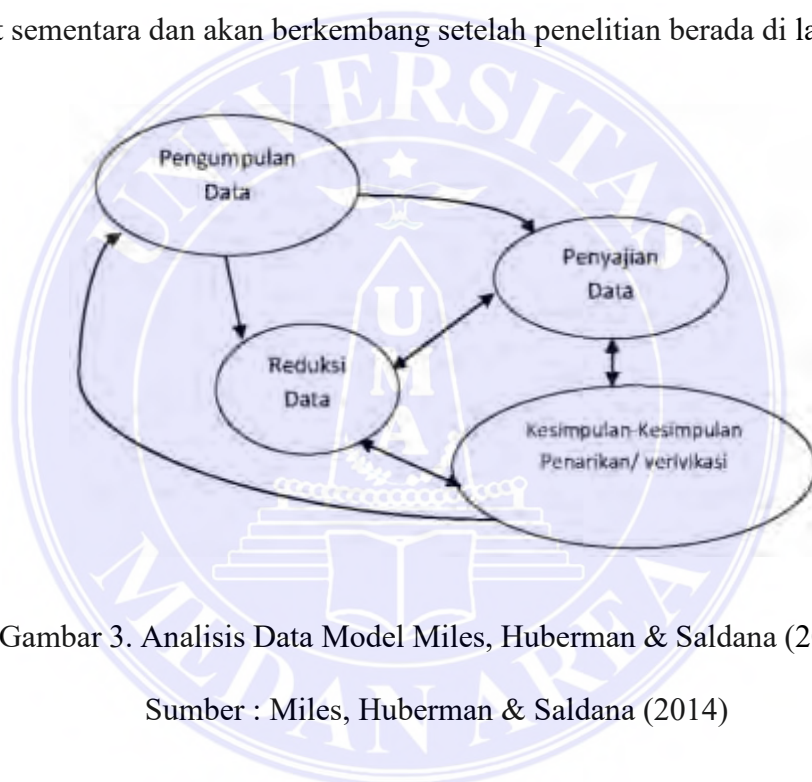
Data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

3. Penyajian Data (Data Display)

Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan ditarik kesimpulan. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.



Gambar 3. Analisis Data Model Miles, Huberman & Saldana (2014)

Sumber : Miles, Huberman & Saldana (2014)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sejumlah kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan di bab terdahulu ialah:

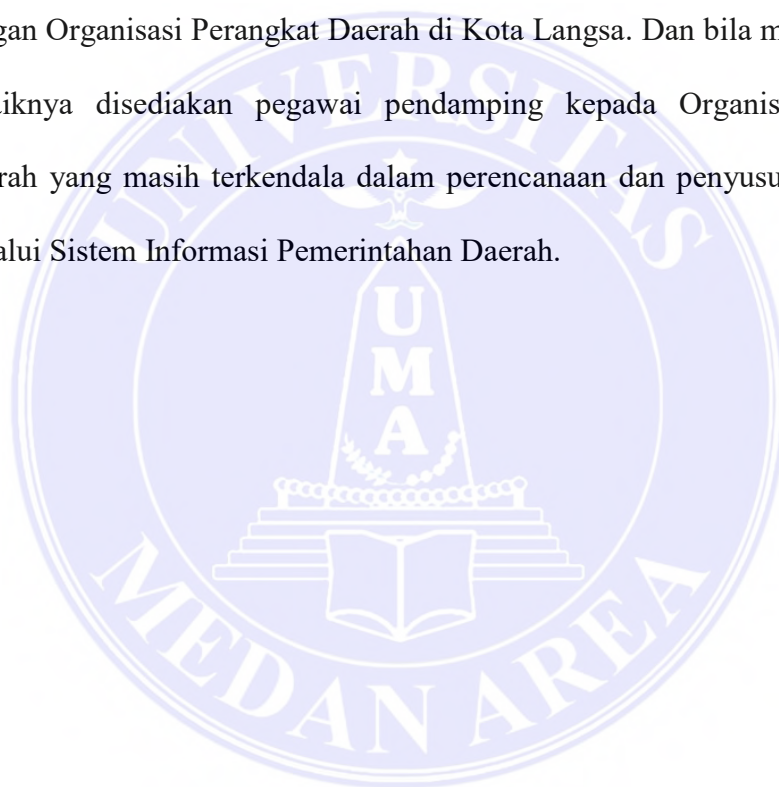
1. Akuntabilitas kinerja Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa dapat dikatakan akuntabel karena dalam proses perencanaan dan penyusunan memanfaatkan teknologi informasi berupa sistem aplikasi SIPD secara tepat, sehingga proses perencanaan dan penyusunan APBD Kota Langsa efektif, efisien, relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta organisasi perangkat daerah
2. Faktor – faktor pendukung tercapainya akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa adalah adanya keselarasan pemahaman Organisasi Perangkat Daerah di Kota Langsa dan merencanakan, menyusun dan menetapkan anggaran dan koordinasi yang dilakukan dalam penginputan anggaran di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) berjalan dengan baik, faktor hambatan hanya terletak pada penyesuaian waktu pendampingan saat pengaplikasian SIPD yang di lakukan di BPKD Kota Langsa melalui Bidang Anggaran

5.2 Saran

Untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa dalam perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Langsa maka peneliti mengemukakan beberapa masukan antara lain:

1. Pada tahap perencanaan, pengalokasian anggaran sebaiknya diperhitungkan dengan cermat berdasarkan informasi yang diajukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa penundaan.
2. Untuk mengatasi faktor kendala sebaiknya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diperbaharui terkait pelaksanaan pendampingan dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Langsa. Dan bila memungkinkan, sebaiknya disediakan pegawai pendamping kepada Organisasi Perangkat Daerah yang masih terkendala dalam perencanaan dan penyusunan Anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2013. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Bastian, Indra. 2008. Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harjanto. 2008. Perencanaan Pengajaran. Jakarta : Rineka Cipta.
- Huda. 2012. Perencanaan Pengajaran. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kunarjo. 2012. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan. Jakarta: UI – Press.
- Kuncoro, M. 2013. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan. Jakarta: UI – Press.
- Mahmudin. 2010. Membudidayakan Akuntabilitas Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugraha, 2010. Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.
- Rahayu. 2011. Penganggaran Sektor Publik. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Sarundajang, S.H. 2012. Pilkada Langsung; Problematika dan Prospek. Edisi Revisi. Kata Hasta Pustaka. Jakarta.
- Sriharioto, 2012. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Suandy, Erly. 2003. Perencanaan Pajak, Edisi Revisi, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.
- Widjaja, HAW. 2007. Otonomi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal:

Bariun, 2015. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kaitannya dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah Daerah Otonom. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol.6 No.4.

Hendarawan, Teuku Rully. 2019. Analisis Perencanaan Dan Evaluasi Anggaran Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Tesis. Medan : Universitas Medan Area

Ismid, Faisal. 2019. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Tesis. Medan : Universitas Medan Area

Mahpudin, Endang. 2017. Analisis Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah pada Instansi Pemerintah Daerah. JRKA Volume 3 Isue 2, Agustus 2017.

Pangalila, Chelsea. 2017. Evaluasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Keuangan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2).

Retnami, 2008. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah : Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal. Akuntansi Pemerintahan 2(1): 53-64.

Salbiah dan Ridha Rizky. 2012. Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

**AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA LANGSA DALAM PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA**

Lokasi Penelitian : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa

Landasan Teori : Pollit & Bouckaert

Jambo Pramana / 221801026

Daftar pertanyaan wawancara yang disusun berlandaskan teori Pollit & Bouckaert

No	Indikator	Dimensi	Judul
Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa			
1	Relevansi	Mengukur keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan	Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa
Bagaimana keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?			
2	Efisiensi	Perbandingan antara input dan output	
Bagaimana Efisiensi perbandingan antara input dengan output dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?			
3	Efektivitas	Tingkat kesesuaian antara tujuan dengan intermediate outcomes (results) dan final outcomes (impacts)	
Bagaimana Efektivitas tingkat kesesuaian antara tujuan dengan intermediate outcomes (results) dan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?			

4	Utility and Sustainability	mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan final outcomes (impacts)	
Bagaimana Utility and Sustainability mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?			
No	Indikator	Dimensi	Judul
Faktor-Faktor Apa yang mendukung dan menghambat kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?			
1	Relevansi	Mengukur keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan	Akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?
Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?			
2	Efisiensi	Perbandingan antara input dan output	
Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat Efisiensi perbandingan antara input dengan output dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?			
3	Efektivitas	Tingkat kesesuaian antara tujuan dengan intermediate outcomes (results) dan final outcomes (impacts)	
Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat Efektivitas tingkat kesesuaian antara tujuan dengan intermediate outcomes (results) dan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?			
4	Utility and Sustainability	mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara	

		kebutuhan dengan final outcomes (impacts)	
Bagaimana Utility and Sustainability mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?			



Lampiran 2 Form Sampel Wawancara

3. Bagaimana keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi anggaran yang telah di susun oleh organisasi perangkat daerah merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan agar tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Langsa dan OPD-OPD tersebut sehingga dapat menunjang kegiatan di tahun berjalan. Oleh sebab itu diperlukan kinerja dari pegawai BPKD terutama pada Bidang Anggaran untuk melaksanakan serangkaian kegiatan tersebut. Terkait dengan relevansi berkaitan dengan serangkaian kegiatan penyusunan admnisitrasi anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran, saya memandang hal ini memang dibutuhkan agar perencanaan dan penyusunan anggaran yang dilaksanakan OPD-OPD lebih teratur dan terkoordinasi sehingga tujuan penetapan DPA terbit tepat waktu terpenuhi.

4. Bagaimana Efisiensi perbandingan antara input dengan output dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

BPKD Kota Langsa memberikan layanan kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam perencanaan APBD dan Penyusunan APBD sampai penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), koordinasi dan evaluasi yang telah dilakukan saya rasa sudah memenuhi unsur efisiensi. Maksudnya OPD-OPD tersebut jika terdapat perencanaan anggaran dan penyusunan anggaran jika tidak terdapat kesesuaian dapat langsung berkoordinasi dengan BPKD.

5. Bagaimana Efektivitas tingkat kesesuaian antara tujuan dengan intermediate outcomes (results) dan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Dengan adanya kinerja dari BPKD dalam menghimpun usulan – usulan program kegiatan sesuai dengan Resntra OPD yang tentunya sesuai dengan

tugas dan fungsi OPD tersebut, sehingga perencanaan program dan kegiatan yang berdampak langsung untuk masyarakat dapat terakomodir, dikarenakan hanya organisasi perangkat daerah lah yang mengetahui kebutuhannya sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bagaimana Utility and Sustainability mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Adanya pendampingan dan koordinasi dalam perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Langsa memudahkan oragnisasi perangkat daerah di Kota Langsa dalam merencanakan, menyusun dan menetapkan anggaran di OPD, pegawai BPKD memberikan pelayanan yang ramah tamah serta penjelasan yang tidak bertele-tele. Pendampingan dalam perencanaan dan penyusunan APBD menurut saya memberikan dampak yang sangat baik terutama bagi OPD-OPD di Kota Langsa, sehingga apabila ada operator penanggung jawab aplikasi perencanaan dan penyusunan APBD kurang paham dalam pengoperasian aplikasi dapat berkonsultasi langsung pada BPKD

7. Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

faktor pendukung dalam tercapainya akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa dalam perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa menurut saya adalah adanya sistem aplikasi berupa SIPD (sistem informasi pembangunan daerah. Untuk faktor penghambatnya adalah masih belum familiarnya sistem SIPD dan seiiring berjalannya waktu terdapat lagi sistem yang hampir mirip yaitu SIPD-RI sehingga masih terkendala beberapa OPD yang operatornya belum terlalu memahami penggunaan aplikasi tersebut.

8. Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat Efisiensi perbandingan antara input dengan output dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Pendampingan dan koordinasi perencanaan dan penyusunan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Langsa dan penginputan Program dan Kegiatan prioritas melalui SIPD langsung dilakukan di BKPD Kota Langsa melalui bidang anggaran, hal ini sebagai pendampingan, koordinasi dan kontrol agar program dan kegiatan prioritas yang akan ditetapkan dapat terakomodir di dalam penetapan DPA. Faktor penghambatnya barang kali hanya pada kesesuaian waktu antar operator OPD dengan pegawai BPKD.

9. Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat Efektivitas tingkat kesesuaian antara tujuan dengan intermediate outcomes (results) dan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Saya kira sejauh ini sudah cukup efektif, nah jika selama ini ada keluhan-keluhan dari OPD, kemungkinan itu hanya berkurangnya pagu dari perencanaan saat penetapan anggaran, dikarenakan penetapan anggaran juga memerhatikan kesanggupan keuangan daerah dan program yang menjadi prioritas nasional maupun daerah.

10. Bagaimana Utility and Sustainability mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

saya rasa prioritas awalnya yang perlu dipahami. Semoga keberlanjutan kinerja ini akan semakin baik dengan perubahan-perubahan yang memudahkan sehingga kinerja ASN di bidang ini juga semakin maksimal. Utility sebaiknya adanya program sosialisasi mengenai perencanaan dan penyusunan APBD Kota Langsa terutama dalam pengaplikasian SIPD di OPD-OPD Kota Langsa.

Informan Penelitian

KHAIRUL ICHSAN S.STP

1. Bagaimana keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Diperlukan kinerja dari pegawai BPKD terutama pada Bidang Anggaran untuk melaksanakan serangkaian kegiatan penyusunan DPA OPD. Terkait dengan relevansi berkaitan dengan serangkaian kegiatan penyusunan admnisitrasi anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran, saya memandang hal ini memang dibutuhkan agar perencanaan dan penyusunan anggaran yang dilaksanakan OPD-OPD lebih teratur dan terkoordinasi sehingga tujuan penetapan DPA terbit tepat waktu terpenuhi.

2. Bagaimana Efisiensi perbandingan antara input dengan output dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

BPKD Kota Langsa memberikan layanan kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam perencanaan APBD dan Penyusunan APBD sampai penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), koordinasi dan evaluasi yang telah dilakukan saya rasa sudah memenuhi unsur efisiensi. Maksudnya OPD-OPD tersebut jika terdapat perencanaan anggaran dan penyusunan anggaran jika tidak terdapat kesesuaian dapat langsung berkoordinasi dengan BPKD.

3. Bagaimana Efektivitas tingkat kesesuaian antara tujuan dengan intermediate outcomes (results) dan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Dengan adanya kinerja dari BPKD dalam menghimpun usulan – usulan program kegiatan sesuai dengan usulan OPD, sehingga perencanaan program dan kegiatan yang berdampak langsung untuk masyarakat dapat terakomodir, dikarenakan hanya OPD yang mengetahui kebutuhannya sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bagaimana Utility and Sustainability mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan

Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Adanya pendampingan dan koordinasi dalam perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Langsa memudahkan OPD di Kota Langsa dalam merencanakan, menyusun dan menetapkan anggaran, pegawai BPKD memberikan pelayanan yang ramah tamah serta penjelasan yang baik. Pendampingan dalam perencanaan dan penyusunan APBD menurut saya memberikan dampak yang sangat baik.

5. Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

faktor pendukung menurut saya adalah adanya sistem aplikasi berupa SIPD (sistem informasi pembangunan daerah. Untuk faktor penghambatnya adalah masih belum familiarnya sistem SIPD dan seiring berjalannya waktu terdapat lagi perubahan aplikasi/sistem.

6. Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat Efisiensi perbandingan antara input dengan output dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Pendampingan, koordinasi dan kontrol agar program dan kegiatan prioritas yang akan ditetapkan dapat terakomodir di dalam penetapan DPA. Faktor penghambatnya barang kali butuh waktu dan tempat yang respentative dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

7. Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat Efektivitas tingkat kesesuaian antara tujuan dengan intermediate outcomes (results) dan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Saya kira sejauh ini sudah cukup efektif, yang dikeluhkan barangkali hanya berkurangnya pagu dari perencanaan saat penetapan anggaran, dikarenakan

penetapan anggaran juga memerhatikan kesanggupan keuangan daerah dan program yang menjadi prioritas nasional maupun daerah.

8. Bagaimana Utility and Sustainability mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

saya rasa prioritas awalnya yang perlu dipahami. Semoga keberlanjutan kinerja ini akan semakin baik dengan perubahan-perubahan yang memudahkan sehingga kinerja ASN di bidang anggaran juga semakin maksimal. Utility sebaiknya adanya sosialisasi/workshop skala besar mengenai perencanaan dan penyusunan APBD Kota Langsa terutama dalam pegaplikasian SIPD di OPD-OPD Kota Langsa.

Informan Penelitian

M .NASIR YACOB SE

1. Bagaimana keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Akuntabilitas kinerja dari pegawai BPKD dalam pendampingan penyusunan dokumen rencana anggaran dan pendapatan belanja Kota Langsa memiliki relevansi yang kuat, artinya transparansi APBD dapat terlaksana dengan baik jika sistematis pendampingan, koordinasi dan penghimpunan usulan-usulan rencana anggaran OPD dapat dilakukan dengan tepat.

2. Bagaimana Efisiensi perbandingan antara input dengan output dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

BPKD Kota Langsa memberikan layanan kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam perencanaan APBD dan Penyusunan APBD sampai penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), koordinasi dan evaluasi yang telah dilakukan saya rasa sudah memenuhi unsur efisiensi. Jika tidak adanya kesesuaian antara yang direncanakan oleh OPD, BPKD dapat mengarahkan atau menyampaikan ketidaksesuaian tersebut dalam Tim TAPD yang nantinya akan dikaji ulang kembali anggaran yang diajukan.

3. Bagaimana Efektivitas tingkat kesesuaian antara tujuan dengan intermediate outcomes (results) dan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Dengan adanya kinerja dari BPKD dalam menghimpun usulan – usulan program kegiatan sesuai dengan usulan OPD, Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun OPD menjadi tepat waktu dan OPD tersebut tidak memiliki hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

4. Bagaimana Utility and Sustainability mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Adanya pendampingan dan koordinasi yang diberikan oleh pegawai BPKD dalam penyusunan dokumen administrasi DPA OPD, membuat OPD-OPD tersebut menjadi terarah dalam penyusunan dan jika ada kendala-kendala pada sistem aplikasi, OPD-OPD tersebut memiliki tempat untuk bertanya

5. Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

faktor pendukung : sistem aplikasi yang semakin baik

faktor penghambat : upgrade sistem terkadang tidak diikuti oleh upgrade user

6. Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat Efisiensi perbandingan antara input dengan output dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Faktor pendukung : pendampingan, koordinasi dan kontrol agar program dan kegiatan prioritas yang akan ditetapkan dapat terakomodir di dalam penetapan DPA.

Faktor penghambat : Waktu, tempat dan Sumber daya aparatur

7. Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat Efektivitas tingkat kesesuaian antara tujuan dengan intermediate outcomes (results) dan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Faktor pendukung : rangkaian kegiatan sudah sistematis dan memudahkan

Faktor penghambat : penyesuaian pagu anggaran dari yang direncanakan terkadang berbeda dengan yang ditetapkan.

8. Bagaimana Utility and Sustainability mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Faktor pendukung : kegiatan ini didukung oleh Sumber daya aparatur di bidang anggaran yang sesuai sehingga memudahkan OPD dan menjadikan dokumen pelaksanaan anggaran tepat waktu.

Faktor penghambat : belum adanya bimbingan teknis yang benar-benar memfokuskan dalam penyusunan DPA secara tatap muka dengan pihak kementerian, sehingga OPD bisa lebih memahaminya.

Informan Penelitian

YUSRIZAL ANDRIA, S.STP, M.S.P



1. Bagaimana keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Relevansi berkaitan dengan serangkaian kegiatan penyusunan admnisitrasi anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran, saya memandang hal ini memang dibutuhkan agar perencanaan dan penyusunan anggaran yang dilaksanakan OPD-OPD lebih teratur dan terkoordinasi sehingga tujuan penetapan DPA terbit tepat waktu terpenuhi. Sehingga kinerja pegawai BPKD dalam mewujudkan hal tersebut harus baik

2. Bagaimana Efisiensi perbandingan antara input dengan output dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Kinerja BPKD dalam pemdampingan,koordinasi dan kontrol dalam penyusunan usulan-usulan rencana anggaran OPD-OPD sehingga nantinya menjadi penetapan APBD Kota Langsa sudah sangat efisien.

3. Bagaimana Efektivitas tingkat kesesuaian antara tujuan dengan intermediate outcomes (results) dan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Dengan adanya kinerja dari BPKD dalam menghimpun usulan – usulan program kegiatan sesuai dengan usulan OPD, sehingga perencanaan program dan kegiatan yang berdampak langsung untuk masyarakat dapat terakomodir, dikarenakan hanya OPD yang mengetahui kebutuhannya sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bagaimana Utility and Sustainability mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Adanya pendampingan dan koordinasi dalam perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Langsa memudahkan OPD di Kota Langsa dalam merencanakan, menyusun dan menetapkan anggaran, pegawai BPKD memberikan pelayanan yang ramah tamah serta penjelasan yang baik. Pendampingan dalam perencanaan dan penyusunan APBD menurut saya memberikan dampak yang sangat baik.

5. Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

faktor pendukung menurut saya adalah sudah adanya sistem komputerisasi yang lebih baik berupa aplikasi SIPD (sistem informasi pembangunan daerah). Untuk faktor penghambatnya adalah masih belum familiarnya sistem SIPD dan seiring berjalannya waktu terdapat lagi perubahan aplikasi/sistem.

6. Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat Efisiensi perbandingan antara input dengan output dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Faktor pendukung : Pendampingan, koordinasi dan kontrol agar program dan kegiatan prioritas yang akan ditetapkan dapat terakomodir di dalam penetapan DPA.

Faktor penghambat : waktu yang sesuai antara pegawai BPKD dan OPD

7. Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat Efektivitas tingkat kesesuaian antara tujuan dengan intermediate outcomes (results) dan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Saya kira sejauh ini sudah cukup efektif, yang dikeluhkan barangkali hanya berkurangnya pagu dari perencanaan saat penetapan anggaran, dikarenakan penetapan anggaran juga memerhatikan kesanggupan keuangan daerah dan program yang menjadi prioritas nasional maupun daerah.

8. Bagaimana Utility and Sustainability mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Saya berharap keberlanjutan kinerja ini akan semakin baik dengan perubahan-perubahan yang memudahkan sehingga kinerja ASN di bidang anggaran juga semakin maksimal. Utility sebaiknya adanya sosialisasi/workshop skala besar mengenai perencanaan dan penyusunan APBD Kota Langsa terutama dalam pegaplikasian SIPD di OPD-OPD Kota Langsa.

Informan Penelitian

FACHRURROZI, S.E



1. Bagaimana keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Terkait dengan relevansi berkaitan dengan serangkaian kegiatan penyusunan admnisitrasi anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran, saya memandang hal ini memang dibutuhkan agar perencanaan dan penyusunan anggaran yang dilaksanakan OPD-OPD lebih tepat.

2. Bagaimana Efisiensi perbandingan antara input dengan output dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

BPKD Kota Langsa memberikan layanan kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam perencanaan APBD dan Penyusunan APBD sampai penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), koordinasi dan evaluasi yang telah dilakukan saya rasa sudah memenuhi unsur efisiensi.

3. Bagaimana Efektivitas tingkat kesesuaian antara tujuan dengan intermediate outcomes (results) dan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Dengan adanya kinerja dari BPKD dalam menghimpun usulan – usulan program kegiatan sesuai dengan usulan OPD, sehingga perencanaan program dan kegiatan yang berdampak langsung untuk masyarakat dapat terakomodir, dikarenakan hanya OPD yang mengetahui kebutuhannya sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bagaimana Utility and Sustainability mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Pendampingan dalam perencanaan dan penyusunan APBD menurut saya memberikan dampak yang sangat baik.

5. Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

*faktor pendukung : perkembangan teknologi dan informasi yang semakin baik.
faktor penghambat : masih sulit dalam mengoperasikan sistem SIPD di beberapa OPD.*

6. Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat Efisiensi perbandingan antara input dengan output dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

*Faktor pendukung : Koordinasi dan kontrol dalam penetapan DPA.
Faktor penghambat : menentukan waktu yang sesuai saat pelaksanaan koordinasi*

7. Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat Efektivitas tingkat kesesuaian antara tujuan dengan intermediate outcomes (results) dan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

*Faktor pendukung : layanan yang diberikan sudah cukup efektif,
Faktor penghambat : barangkali hanya berkurangnya pagu dari perencanaan saat penetapan anggaran.*

8. Bagaimana Utility and Sustainability mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Harapan saya Semoga keberlanjutan kinerja ini akan semakin baik dengan perubahan-perubahan yang memudahkan sehingga kinerja ASN di bidang anggaran juga semakin maksimal. Utility sebaiknya adanya peningkatan sumber daya aparatur melalui bimbingan teknis yang diselenggarakan.

Informan Penelitian

MUSLIM RIDWAN, S.H

1. Bagaimana keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Diperlukan kinerja dari pegawai BPKD terutama pada Bidang Anggaran untuk melaksanakan serangkaian kegiatan penyusunan DPA OPD. Terkait dengan relevansi berkaitan dengan serangkaian kegiatan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, saya memandang hal ini memang dibutuhkan agar perencanaan dan penyusunan anggaran yang dilaksanakan OPD-OPD lebih teratur dan terkoordinasi sehingga tujuan penetapan DPA terbit tepat waktu terpenuhi.

2. Bagaimana Efisiensi perbandingan antara input dengan output dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

koordinasi dan evaluasi yang telah dilakukan saya rasa sudah memenuhi unsur efisiensi. Maksudnya OPD-OPD tersebut jika terdapat perencanaan anggaran dan penyusunan anggaran jika tidak terdapat kesesuaian dapat langsung berkoordinasi dengan BPKD.

3. Bagaimana Efektivitas tingkat kesesuaian antara tujuan dengan intermediate outcomes (results) dan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Dengan adanya kinerja dari BPKD dalam menghimpun usulan – usulan program kegiatan sesuai dengan usulan OPD, sehingga perencanaan program dan kegiatan yang berdampak langsung untuk masyarakat dapat terakomodir, dikarenakan hanya OPD yang mengetahui kebutuhannya sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bagaimana Utility and Sustainability mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Adanya pendampingan dan koordinasi dalam perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Langsa memudahkan OPD di Kota Langsa dalam merencanakan, menyusun dan menetapkan anggaran, pegawai BPKD memberikan pelayanan dengan baik serta penjelasan yang mudah dipahami. Pendampingan dalam perencanaan dan penyusunan APBD menurut saya memberikan dampak yang sangat baik.

5. Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

faktor pendukung menurut saya adalah adanya SIPD (sistem informasi pembangunan daerah. Untuk faktor penghambatnya adalah masih banyak OPD yang tidak memiliki aparatur yang cakap terhadap penggunaan sistem SIPD dan seiring berjalannya waktu terdapat lagi perubahan aplikasi/sistem.

6. Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat Efisiensi perbandingan antara input dengan output dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Pendampingan, koordinasi dan kontrol agar program dan kegiatan prioritas yang akan ditetapkan dapat terakomodir di dalam penetapan DPA. Faktor penghambatnya barang kali dibutuhkan peningkatan kompetensi aparatur melalui bimbingan teknis secara langsung dan waktu yang sedikit panjang.

7. Faktor-Faktor apa yang mendukung dan menghambat Efektivitas tingkat kesesuaian antara tujuan dengan intermediate outcomes (results) dan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Saya kira sejauh ini sudah cukup efektif, yang dikeluhkan barangkali hanya berkurangnya pagu dari perencanaan saat penetapan anggaran, dikarenakan penetapan anggaran juga memerhatikan kesanggupan keuangan daerah dan program yang menjadi prioritas nasional maupun daerah.

8. Bagaimana Utility and Sustainability mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan final outcomes (impacts) dalam kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa Dalam Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa?

Jawab :

Harapan saya semoga keberlanjutan kinerja ini akan semakin baik dengan perubahan-perubahan yang memudahkan sehingga kinerja ASN di bidang anggaran juga semakin maksimal. Utility sebaiknya adanya peningkatan sumber daya aparatur melalui kegiatan bimtek, workshop ataupun sosialisasi.

Informan Penelitian

ELIANA, S.H, M.H



Lampiran 3 Photo Dokumentasi



Photo 1

Wawancara Bersama Kepala BPKD Kota Langsa
Bapak Khairul Ihsan, S.STP



Photo 2

Wawancara Bersama Kabid Aset dan Inventaris BPKD Kota Langsa
Bapak Yusrizal Andria, S.STP, M.S.P



Photo 3

Wawancara Bersama Kabid Akutansi BPKD Kota Langsa
Bapak Muslim Ridwan, S.H



Photo 4

Wawancara Bersama Kabid Pendapatan BPKD Kota Langsa
Bapak Fachrurrozi, S.E